

Analisis Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Sofiatun Amaliyah¹⁾

sofiaamalia774@gmail.com

Muhammad Arif²⁾

arifmdev@gmail.com

^{1) 2)}Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini melihat bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, indeks kedalaman kemiskinan, tingkat pendidikan, dan produk domestik bruto regional mempengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan antara tahun 2017 dan 2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, Fixed Effect Model merupakan model terbaik dalam penelitian ini. Uji validitas pengaruh mengungkapkan bahwa faktor tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, kemiskinan, pendidikan, dan wilayah berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, kemiskinan, pendidikan, dan produk domestik bruto daerah semuanya memiliki hubungan yang bervariasi dengan karakteristik disparitas distribusi pendapatan yang dibuktikan dengan koefisien determinasi sebesar 12,59%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Kata kunci: disparitas pendapatan, tingkat tenaga kerja, pengeluaran perkapita, kemiskinan, pendidikan, pdrb perkapita

PENDAHULUAN

Melalui pertumbuhan ekonomi, setiap pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warganya. Arif & Wicaksani (2017) menegaskan bahwa memperoleh nilai total Produk Domestik Bruto merupakan indikator penting pembangunan ekonomi. Untuk menjamin distribusi yang adil dari PDB nasional secara keseluruhan, keadilan ekonomi bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara disparitas pendapatan dan proses pertumbuhan ekonomi yang cepat (Hariani, 2019). Ketika suatu bangsa mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa didukung oleh keadilan ekonomi, maka daya tarik tersebut akan terwujud dan berdampak pada trade-off antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan antar berbagai daerah. Jika pemerataan ekonomi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan timbul disparitas pendapatan (Yuliani, 2015).

Ketimpangan pendapatan Didefinisikan sebagai perbedaan tingkat pendapatan masyarakat berpenghasilan relatif tinggi dan rendah. Ketimpangan Pendapatan merupakan masalah diberbagai negara, baik di negara maju atau di negara berkembang. Dampak adanya Ketimpangan Pendapatan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, dalam upaya menangani serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan dilakukannya pemerataan pendapatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ersad et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khoirudin & Musta'in, 2020). Membandingkan pendapatan aktual daerah yang bersangkutan dengan indikator produk domestik regional bruto penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Williamson (dalam Sjafrizal, 2008: 95) menegaskan bahwa selama tahap awal pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan akan melebar dan rekomendasi akan dibuat untuk beberapa bidang yang pada awalnya lebih maju, seperti pembangunan industri, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kemudian, seiring percepatan pertumbuhan, konvergensi terjadi, dan perbedaan pendapatan akan menurun.

Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia sampai saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan. Secara geografis, Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita yang berbeda-beda. Untuk mencapai pembangunan daerah, pemerintah harus mengutamakan potensi yang ada di sana. Hal ini akan memungkinkan setiap daerah berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, dengan tujuan menjadikan potensi tersebut sebagai motor penggerak kemajuan ekonomi. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah, kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dapat memberikan hasil dan dirasakan pada semua lapisan masyarakat.

Salah satunya menentukan derajat fokus pendapatan dengan menggunakan Indeks Gini, yang menghitung bagian pendapatan yang diperoleh setiap persentase penduduk berdasarkan Kurva Lorenz (Priyanto et al., 2020). Dalam hal ketimpangan pendapatan antar provinsi penyusunnya, Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke-6, menurut data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Tabel 1 memperlihatkan provinsi-provinsi di Indonesia dengan peringkat Indeks Saat Ini tertinggi.

Tabel 1. Provinsi dengan Indeks Gini tertinggi di Indonesia

Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Yogyakarta	0,436	0,432	0,423	0,435	0,438
Povinsi Gorontalo	0,417	0,41	0,41	0,407	0,408
Provinsi Jawa Barat	0,398	0,406	0,4	0,4	0,409
Provinsi Jakarta	0,411	0,392	0,39	0,399	0,41

Provinsi Sulawesi Tenggara	0,399	0,401	0,4	0,388	0.392
Provinsi Sulawesi Selatan	0,399	0,4	0,39	0,385	0.379
Provinsi Papua	0,397	0,391	0,39	0,393	0.396
Provinsi Papua Barat	0,388	0,392	0,39	0,37	0.377
Rata-rata nasional	0,392	0,386	0,38	0,397	0.401

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan dengan urutan ke-6 dari 8 provinsi tertinggi lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam hal peningkatan pendapatan per kapita, masyarakat sekitar belum sepenuhnya menikmati pembangunan ekonomi. Standar sumber daya manusia mempengaruhi kapasitas setiap orang untuk pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), digunakan untuk mengevaluasi kemakmuran dan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Ini mengukur kinerja pembangunan manusia. Indeks tersebut dapat diperiksa dari tiga perspektif yang berbeda: rata-rata lama bersekolah, daya beli, dan harapan hidup saat lahir (paritas daya beli). Bersama-sama, ketiga metrik ini membantu mengukur keadaan modal manusia. Semakin besar kapasitas masyarakat untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan hasil pembangunan, semakin tinggi modal manusianya (Todaro, 2009).

Perbedaan regional dalam pendapatan adalah masalah besar. Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji dampak tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, indeks kedalaman kemiskinan, pendidikan, dan produk domestik regional bruto terhadap disparitas distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. antara tahun 2017 dan 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Disparitas Distribusi Pendapatan

Kegiatan perekonomian suatu daerah seringkali mengalami ketimpangan atau ketimpangan di antara keduanya. Karena variasi demografi masing-masing daerah dan susunan sumber daya alam, hal ini terjadi (Lestari et al., 2019).

Mengingat bahwa distribusi pendapatan pada dasarnya berfungsi sebagai ukuran kemiskinan relatif, distribusi pendapatan merupakan salah satu segi kemiskinan yang memerlukan pemeriksaan. Kehancuran absolut dan relatif termasuk dalam kategori kemiskinan absolut. Dalam keadaan kemiskinan absolut, pendapatan seseorang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Persentase distribusi pendapatan daerah digunakan untuk menghitung kemiskinan relatif (Sukino, 2013).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja suatu daerah merupakan indikator kesehatan ekonomi yang berguna, menurut Pitono (2002), yang dikutip oleh Munir (2016). Ketika suatu populasi mencapai usia kerja, persentase tertentu dari populasi tersebut akan bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik, statistik yang disebut tingkat partisipasi angkatan kerja digunakan untuk menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang bekerja (2018). Statistik TPAK diterapkan sebagai pengganti ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja diwakili oleh statistik yang disebut TPAK.

Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, adalah jumlah yang dibelanjakan selama periode waktu tertentu untuk konsumsi anggota rumah tangga.

Muhamad Abdul Halim menggarisbawahi bahwa berkonsentrasi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pendekatan yang tepat untuk menghitung total pengeluaran per kapita satu anggota keluarga. Oleh karena itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh rumah tangga selama periode waktu tertentu untuk barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota keluarga. Jumlah pengeluaran bervariasi tergantung pada pendapatan keluarga, jika penghasilan Anda rendah, Anda akan memiliki lebih sedikit pengeluaran untuk dipenuhi. Pengeluaran per kapita terutama dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang berbanding terbalik, artinya ketika pendapatan meningkat, maka pengeluaran konsumsi masyarakat juga meningkat.

Kemiskinan

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak memiliki tempat tinggal, sakit atau tidak dapat mengakses perawatan kesehatan, tidak dapat memperoleh manfaat dari pendidikan (sekolah), tidak dapat membaca dan menulis (read-write), tidak memiliki pekerjaan sehingga masa depan tidak pasti, tidak memiliki akses terhadap air bersih, tidak berdaya, tidak memiliki representasi, dan tidak bebas. Metode kebutuhan dasar digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan tingkat kemiskinan. Secara sederhana, kemiskinan adalah ketidakmampuan, dari sudut pandang ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran, dan seseorang dicap miskin jika tidak mampu. Menurut BPS, Indeks Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) mengukur jumlah rata-rata yang dihabiskan setiap orang miskin untuk hidup dan digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan. Semakin jauh pengeluaran penduduk tipikal dari garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeksinya.

Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pendidikan sebagai proses mengubah keyakinan seseorang atau kelompok dan melakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan individu.. Simanjuntak (1998) berpendapat bahwa derajat pendidikan seseorang akan meningkat seiring dengan banyaknya pilihan pekerjaan yang tersedia baginya. Orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi, misalnya, memilih masuk ke pasar kerja karena percaya bahwa kebutuhan dunia kerja pasti dipenuhi oleh tenaga kerja terdidik seperti dirinya daripada memilih berdiam diri di rumah, atau mengurus pekerjaan rumah tangga.

Produk Domestik Regional Bruto

BPS mendefinisikan produk domestik regional bruto (PDB) sebagai jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh badan usaha di suatu daerah dan dihitung sebagai penjumlahan dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh entitas ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi riil atau pertumbuhan yang tidak mengubah komponen harga dari tahun ke tahun diukur dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) yang didasarkan pada harga konstan. Dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, ukuran PDRB ini dibuat dan menjelaskan peningkatan nilai barang dan jasa tersebut..

METODE

Pengumpulan data

Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif. Data dari time series dan cross section provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga 2021 merupakan data sekunder yang digunakan. Informasi tentang distribusi disparitas pendapatan provinsi Sulawesi Selatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, kemiskinan, pendidikan, dan produk domestik regional bruto. sumber data diperoleh berdasarkan Badan Pusat Statistik (Sari et al., 2018).

Pengukuran

Data panel dari sumber sekunder inilah yang digunakan dalam investigasi ini. Pada data panel, satuan cross section yang sama diukur pada berbagai periode dan digabungkan dengan data time series (Soeharjoto, 2020). Atau dikatakan, data panel adalah informasi tentang satu orang yang telah diamati berulang kali sepanjang waktu. Istilah "data deret waktu" mengacu pada kumpulan pengamatan peristiwa berulang, kejadian, gejala, atau perubahan. Data deret waktu 5 tahun ($t = 5$) penelitian mencakup tahun 2017 hingga 2021. 24 kabupaten atau kota di provinsi Sulawesi Selatan menjadi data cross-sectional untuk studi ini ($n = 24$). Dengan model ekonometrika sebagai estimator, penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Panel sebagai berikut:

$$\text{LOG}(DP)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{TPAK}_{it} + \beta_2 \text{LOG}(PP)_{it} + \beta_3 \text{POV}_{it} + \beta_4 \text{LOG}(EDU)_{it} + \beta_5 \text{LOG}(PDRB)_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

<i>DP</i>	: Disparitas Pendapatan (Indeks)
<i>TPAK</i>	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
<i>PP</i>	: Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/orang/tahun)
<i>POV</i>	: Kemiskinan (Indeks)
<i>EDU</i>	: Pendidikan (Tahun)
<i>PDRB</i>	: Produk domestik regional bruto (Milyar Rp)
ε	: Error term
β_0	: Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_5$: Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	: cross section (23 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan)
<i>t</i>	: time series (tahun 2017 – 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Chow dan uji Hausman akan digunakan untuk membandingkan kinerja ketiga model penduga, Pooled Least Square, fixed effect model, dan random effect model. Uji Langrange Multiplier harus dilakukan untuk mengidentifikasi mana dari dua model yang dipilih jika uji Hausman memilih Model Random Effect dan uji Chow memilih Pooled Least Square. Model estimasi yang ideal adalah Model Pooled Least Square dan Random Effects.

Tabel 2.
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	-0.474905	6.3572450	-0.434831
<i>EMP</i>	0.002767	0.002328	0.002745
<i>LOG(PP)</i>	-0.138741	-1.022730	-0.146635
<i>POV</i>	-0.030990	-0.011193	-0.024834
<i>LOG(EDU)</i>	0.131824	0.882593	0.143765
<i>LOG(PDRB)</i>	0.038110	0.007341	0.038123
R^2	0.223171	0.547557	0.125931
Adjusted R^2	0.189100	0.408343	0.087594
Statistik <i>F</i>	6.550106	3.933220	3.2848844
Prob. Statistik <i>F</i>	0.000022	0.000000	0.008279

Sumber: BPS, diolah.

Uji Pemilihan Model Terestimasi

Uji Chow

Estimasi model dari Fixed Effect Model atau Pooled Least Square dipilih menggunakan uji Chow. Pooled Least Square adalah model yang diestimasi untuk H_0 dari uji Chow, dan Fixed Effect Model diestimasi untuk H_A . Jika nilai p , probabilitas, atau signifikansi empiris statistik dari $F > \alpha$, H_0 diterima; jika variabel tersebut menunjukkan bahwa $F \leq \alpha$ tidak signifikan secara statistik, maka H_0 ditolak. Tabel 3.2 memberikan hasil tes Chow.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.836680	(23,91)	0.0002

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas sebesar 0,0002 ($\leq 0,05$), maka H_0 ditolak. Kesimpulannya, model terbaik adalah Fixed Effect Model.

Uji Hausman

Untuk memilih antara estimasi Model Efek Tetap dan Model Efek Acak, uji Hausman diterapkan. H_0 : Random Effects Model dan H_A : Fixed Effects Model. H_0 diterima jika nilai probabilitas $\chi^2 > \alpha$; H_0 ditolak bila nilai probabilitas $\chi^2 \leq \alpha$. Pada Tabel 4, ditampilkan hasil uji Hausman.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.635251	5	0.1775

Tabel 4 terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0.1775 ($> 0,1$), jadi H_0 tidak ditolak. Kesimpulannya, model terbaik yaitu Random Effect Model.

Random effect model ditetapkan sebagai model estimasi terbaik dari uji Chow dan uji Hausman yang dilakukan sebelumnya. Tabel 2 dan Tabel 5 memberikan semua hasil estimasi untuk random effect model.

Tabel 5. Model Estimasi Random Effect Model (REM)

$$\begin{aligned} \text{LOG(DP)}_{it} = & -0.434831 + 0.002745 \text{TPAK}_{it} - 0.146635 \text{LOG(PP)}_{it} - 0.024834 \text{POV}_{it} \\ & (0.0662)^{***} \quad (0.0483)^{**} \quad (0.0622)^{***} \\ & + 0.143765 \text{LOG(EDUC)}_{it} + 0.038123 \text{LOG(PDRB)}_{it} \\ & (0.0770)^{***} \quad (0.0141)^{**} \end{aligned}$$

$$R^2 = 0.125931; \text{Adj. } R^2 = 0.087594; \text{F-Stat} = 3.284884; \text{Prob. F-Stat.} = 0.008279$$

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; *** Signifikan pada $\alpha = 0,10$

Uji Keباikan Model

Uji Eksistensi Model

Uji eksistensi model adalah uji F . Model eksis ketika terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). formulasi hipotesisnya: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ Artinya secara bersama sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pengeluaran Perkapita, Kemiskinan, pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021; $H_A: \beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0 \vee \beta_4 \neq 0 \vee \beta_5 \neq 0$ Artinya secara bersama sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pengeluaran Perkapita, Kemiskinan,

pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. H_0 diterima jika nilai probabilitas $> \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai probabilitas $< \alpha$.

Seperti terlihat pada Tabel 5, H_0 ditolak karena nilai probabilitas F adalah 0,008279 (0,01). Model tersebut menunjukkan bahwa disparitas distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan antara tahun 2017 -2021 dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, kemiskinan, pendidikan, dan produk domestik regional bruto..

Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan model turunan untuk memprediksi hasil (R^2). Nilai R^2 sebesar 0,125931, sesuai Tabel 5. menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, kemiskinan, pendidikan, dan produk domestik regional bruto dapat memberikan kontribusi sebesar 12,59% terhadap variasi variabel disparitas distribusi pendapatan. Model tidak memperhitungkan sisanya, yaitu 87,41% dari total.

Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi

Pada Uji ini independen variabel akan diuji untuk mengetahui pengaruh nyata terhadap dependen variabel atau tidak. Kriteria pengujianya yaitu, H_0 uji t menyatakan $\beta_i = 0$, artinya variabel independen ke-i tidak memegang pengaruh terhadap variabel dependen; sedangkan H_A menyatakan $\beta_i \neq 0$, artinya variabel independen ke-i memegang pengaruh terhadap variabel dependen. H_0 tidak ditolak ketika prob t statistik $> \alpha$; dan H_0 ditolak ketika nilai prob t statistik $\leq \alpha$. Tabel 6. Menunjukkan hasil dari uji validitas pengaruh (uji t).

Berdasarkan Tabel 6. diketahui semua variabel memiliki pengaruh nyata terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	t	Sig. t	Kriteria	Kesimpulan
TPAK	1.854655	0.0662	$< 0,10$	Signifikan pada $\alpha = 0,10$
LOG(PP)	-1.995816	0.0483	$< 0,05$	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
IKK	-1.883134	0.0622	$< 0,10$	Signifikan pada $\alpha = 0,10$
LOG(EDU)	1.784639	0.0770	$< 0,10$	Signifikan pada $\alpha = 0,10$
LOG(PDRB)	2.494060	0.0141	$< 0,05$	Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Interpretasi Variabel Independen

Koefisien regresi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 0,002745, dan struktur sambungannya adalah logaritmik-linier. Artinya, ketimpangan distribusi pendapatan akan naik sebesar 0,2745 persen jika tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 1%. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi angkatan kerja turun sebesar 1%, maka ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0,2745%.

Koefisien regresi untuk variabel pengeluaran perkapita adalah -0,146635, dan hubungannya adalah logaritmik-logaritmik. Artinya jika variabel Pengeluaran Per Kapita naik sebesar 1% maka Disparitas Distribusi Pendapatan akan turun sebesar 0,146635%. Disparitas distribusi pendapatan akan meningkat sebesar 0,146635 persen jika variabel Pengeluaran Per Kapita diturunkan sebesar 1 persen.

Koefisien regresi untuk variabel kemiskinan yang memiliki hubungan logaritmik-linear adalah -0,024834. Dengan kata lain Ketimpangan Distribusi Pendapatan akan turun sebesar 0,024834 persen jika variabel Kemiskinan naik 1 indeks. Perbedaan distribusi pendapatan akan meningkat sebesar 0,024834 persen, sebaliknya jika variabel kemiskinan turun sebesar 1 indeks.

Koefisien regresi untuk variabel pendidikan sebesar 0,143765, dan hubungan antara

kedua variabel adalah logaritmik-logaritmik. Dengan kata lain Disparitas Distribusi Pendapatan akan bertambah sebesar 0,143765 persen jika variabel Pendidikan meningkat sebesar 1%. Sebaliknya, Disparitas Distribusi Pendapatan akan meningkat sebesar 0,143765 persen jika variabel Pendidikan diturunkan sebesar 1%.

Koefisien regresi untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah 0,038123, dan hubungan antara kedua variabel adalah logaritmik-logaritmik. Dengan kata lain disparitas distribusi pendapatan akan meningkat sebesar 0,038123 persen jika variabel produk domestik regional bruto meningkat sebesar Rp. 1%. Sebaliknya jika variabel PDRB turun sebesar 1% maka Disparitas Distribusi Pendapatan akan turun sebesar 0,038123%.

Interpretasi Ekonomi

Sesuai dengan uji validitas pengaruh pada Model Random Effect ditemukan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memegang pengaruh atas Disparitas Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, disparitas pendapatan Sulawesi Selatan antara tahun 2017 dan 2021 dipengaruhi secara positif oleh jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, besar kecilnya angkatan kerja berdampak pada disparitas pendapatan. Berapa banyak orang yang berusia sepuluh tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja ditentukan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa hal itu akan berdampak pada penawaran tenaga kerja yang bersedia bekerja dalam perekonomian untuk menciptakan produk dan jasa. Karena produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, maka besarnya partisipasi angkatan kerja secara tidak langsung berdampak menguntungkan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Karena peningkatan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata, beberapa daerah akan mengalami kemajuan relatif dalam pembangunan sebagai hasil inisiatif produktivitas tenaga kerja, sementara daerah lain akan mengalami penurunan relatif karena kekurangan tenaga kerja produktif. Hal ini akan mendorong perkembangan yang tidak seimbang. Jika hal ini dibiarkan terus, ketimpangan pembangunan di provinsi dan kota khususnya di Indonesia akan semakin besar. Oleh karena itu, setiap orang harus terus produktif dalam bekerja. Perempuan seharusnya, selain laki-laki, berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena hal itu akan meningkatkan pendapatan individu, yang akan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan per kapita (Wahyuni & Monika, 2017).

Menurut temuan studi, karena belanja konsumen per kapita bervariasi pada masyarakat, kesenjangan pendapatan Sulawesi Selatan meningkat selama rentang waktu 2017-2021. Konsumsi dan pengeluaran berkorelasi erat karena seseorang dengan pendapatan tinggi hampir pasti juga memiliki tingkat pengeluaran konsumsi yang tinggi. Namun, seseorang dengan pendapatan rendah kemungkinan akan memiliki pengeluaran konsumsi yang rendah, yang akan menyebabkan ketimpangan pendapatan. apa yang terjadi di lokasi tertentu, seperti kabupaten dan kota Sulawesi Selatan. Dengan demikian, dampak uang yang cukup besar terhadap pengeluaran ditunjukkan. Pendapatan dan kesejahteraan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi untuk barang dan jasa, begitu pula sebaliknya

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, dari tahun 2017 hingga 2021 Sulawesi Selatan akan mengalami ketimpangan pendapatan yang akan merugikan. Karena perbedaan pendapatan yang ada antara masyarakat lokal, kemiskinan sering muncul di daerah tersebut. Keadaan di sekitar seseorang, berlawanan dengan lingkungannya, adalah yang paling kuat mempengaruhi tingkat kemiskinannya. Kemiskinan relatif merupakan kondisi yang memprihatinkan akibat pengaruh strategi pembangunan yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Masalah kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan tidak dapat diselesaikan. situasi di mana sejumlah kecil orang dapat memperoleh manfaat dari sebagian besar pendapatan suatu negara sementara orang lain menerima sejumlah kecil atau tidak sama sekali.

Berdasarkan temuan penelitian, pendidikan akan berdampak positif terhadap ketimpangan

pendapatan Sulawesi Selatan antara tahun 2017 dan 2021. Hal ini karena di suatu daerah, tingkat pendidikan akan berdampak pada ketimpangan pendapatan jika terdapat penduduk dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. pendidikan dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Tingkat disparitas pendapatan yang tinggi akan terjadi setiap bulan karena mereka yang berpendidikan lebih rendah merasa kesulitan untuk mendapatkan posisi dengan cakupan yang lebih luas (Angeles et al., 2021). Sumber daya manusia suatu bangsa memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan tingkat kemakmurannya, dan pendidikan memainkan peran kunci dalam hal ini. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di suatu daerah, maka pemerintah harus meningkatkan investasinya di bidang pendidikan (Shahabadi et al., 2018). Akibatnya, pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mempromosikan pembelajaran, memberikan perhatian khusus pada daerah pedesaan selain perkotaan. Dengan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang mampu bersaing di dunia kerja dan memperoleh pendapatan yang juga akan berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan juga akan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas (Kudasheva et al., 2015).

PDRB per kapita berdampak positif terhadap ketimpangan pendapatan Sulawesi Selatan antara tahun 2017 dan 2021, menurut temuan penelitian tersebut di atas (Mujahid et al., 2022). Hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi atau PDRB per kapita berdampak pada ketimpangan pendapatan di suatu negara atau wilayah didukung oleh penelitian ini. Tingkat perkembangan ekonomi di suatu daerah diukur dengan tingkat pertumbuhan PDRB, memungkinkan untuk kemajuan pembangunan ekonomi dan pembahasan pendapatan. Namun hal ini akan berubah nantinya ketika ketimpangan pendapatan turun, atau dengan kata lain, ketika kesenjangan ekonomi antar daerah semakin kecil (Pauzi & Budiana, 2016). Seperti diketahui bahwa pendapatan pada awal ekspansi ekonomi dipengaruhi secara positif oleh PDRB per kapita yang menggambarkan distribusi pendapatan.

KESIMPULAN

Berikut dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2021:

- a. Random effect model (REM) memberikan estimasi paling akurat.
- b. koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,125931, menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, kemiskinan, pendidikan, dan produk domestik regional bruto dapat memberikan kontribusi sebesar 12,59% terhadap variasi variabel disparitas distribusi pendapatan. Model tidak memperhitungkan sisanya, yaitu 87,41% dari total.
- c. Pengujian Validitas Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pengeluaran Per Kapita, Kemiskinan, Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh besar terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017–2021.
- d. Daerah Tana Toraja mengalami ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi sedangkan daerah Wajo mengalami ketimpangan yang sangat rendah.

REFERENSI

Angeles, A. C., Donaire, S. J., Reyes, R. B., & Cabauatan, R. (2021). The Effect of Gender Inequality in Education, Labor Force Participation and Economic Opportunity on the Income Distribution of India. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(3), 781–794. <https://e->

journal.my.id/jsgp/article/view/1479

- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Ersad, M., Amir, A., & Zulgani. (2022). Dampak IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/15614/13924>
- Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 3(1), 13–23. <https://ejournal.unai.ac.id/index.php/TIJAB>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kudasheva, T., Kunitsa, S., & Mukhamediyev, B. (2015). Effects of Access to Education and Information-communication Technology on Income Inequality In Kazakhstan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 940–947. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.459>
- Lestari, D., Rahmi, D., & Julia, A. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat pada Tahun 2000-2018 Effect Of Economic Growth on Income Distribution in West Java in 2000-2018 untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. *Prosiding Ilmu Ekonomi UNISBA*, 5(1), 68–74.
- Mujahid, Rizali, & Rahmini, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Ketergantungan Penduduk, Rasio Belanja Modal dan Dana Desa Terhadap Distribusi Pendapatan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Syntax Literate*, 7(1), 1064–1078. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/5972/3199>
- Pauzi, A., & Budiana, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(6), 668–691.
- Prijanto, W. J., Destiningsih, R., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Keimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2(1), 109–125.
- Sari, P. I. M., Mulatsih, S., & Fahmi, I. (2018). Income Distribution Inequality in West Sumatera and the Related Factors. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.2014.1-7>
- Shahabadi, A., Nemati, M., & Hosseinidoust, S. E. (2018). The effect of education on income inequality in selected Islamic countries. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 14(2), 61–78. <https://doi.org/10.21315/ijaps2018.14.2.3>
- Soeharjoto, S. (2020). Factors That Affect Inequality Distribution Income in Central Java. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 122–130. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1196>
- Wahyuni, R. N. T., & Monika, A. K. (2017). Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.63>
- YULIANI, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur. *Jejak*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3854>